

PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURUN MODERN (Telaah Atas Tulisan Karel A. Steenbrink)

Muhamad Zainal Akhyar¹, Umar Samsudin²
STAI Nurul Iman Bogor¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani²
ah.yar32@gmail.com¹, umarsamsudin@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas tentang perkembangan pendidikan agama Islam dan kaitannya dengan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kolonial hingga beberapa tahun setelah kemerdekaan. Upaya memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan modern mengharuskan adanya berbagai perubahan dan penyesuaian dalam sistem pendidikan. Berbagai pembaharuan yang muncul, seperti di Minangkabau, al-Jamiyah al-Washiliyah, Muhammadiyah, PERTI, NU, dll merupakan upaya umat Islam dalam memajukan pendidikan agama Islam bagi masyarakat muslim Indonesia. Kajian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Sumber data utama adalah karya Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*. Sumber data yang lain diperoleh dari literatur kepustakaan, seperti: buku, jurnal, dan lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa madrasah merupakan sintesis dari sistem pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan Indonesia telah mengadopsi pendidikan agama yang mulanya hanya dilakukan di pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama juga telah membuka diri dengan melaksanakan pendidikan umum bagi para santri.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Agama, Pendidikan Umum*

Abstract: *This paper will discuss the development of Islamic religious education and its relation to the education system in Indonesia during the colonial period until a few years after independence. Efforts to incorporate Islamic religious education into the modern education system require various changes and adjustments in the education system. Various reforms that have emerged, such as in Minangkabau, al-Jamiyah al-Washiliyah, Muhammadiyah, PERTI, NU, etc. are efforts of Muslims in advancing Islamic religious education for the Indonesian Muslim community. This study is a qualitative literature research. The main data sources are the works of Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Schools: Islamic Education in the modern period*. Other sources of data are obtained from literature literature, such as: books, journals, and others. The results of the discussion show that madrasah are a synthesis of the religious education system and general education. The Indonesian education system has adopted religious education which was originally only carried out in Islamic boarding schools as traditional educational institutions. Pesantren as a traditional educational institution that only teaches religious knowledge has also opened up by implementing general education for students.*

Keywords: *Renewal, Religion, General Education*

PENDAHULUAN

Karel A. Steenbrink adalah salah satu dari sekian banyak peneliti non-muslim yang berkecimpung dalam bidang pendidikan Islam di Indonesia. Ia merupakan seorang peneliti luar (*outsider*) dalam penelitian yang dilakukannya ini. Pembahasan dalam karyanya (*Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*) difokuskan pada perkembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, madrasah dan sekolah. Dari karyanya ini dapat diambil banyak informasi tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam sejak zaman kolonial sampai pada kurun tahun 70-an. Walaupun penelitian ini tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, namun secara umum sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia sudah tergambarkan dalam laporan penelitian ini. Selain itu juga dapat diketahui tokoh-tokoh pembaharu pendidikan

Indonesia, baik ide maupun buah dari pemikirannya yang berupa lembaga pendidikan yang sebagian besar masih dapat kita jumpai.

Walaupun penelitian Steenbrink ini sudah dilakukan beberapa dekade yang lalu, namun hasil penelitian ini masih tetap relevan untuk dikaji. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti belakangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang/tema terkait. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengulas sekilas tentang isi buku hasil penelitian Steenbrink ini. Selain itu juga perlu menambahkan beberapa catatan yang mungkin tidak sengaja terlewatkan oleh Steenbrink. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sejarah perkembangan lembaga serta modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia, baik yang berupa pesantren, madrasah maupun sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang Dualistis Hingga Mewujudkan Konvergensi

Pada permulaan abad XIX sudah ada upaya untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun nampaknya upaya ini belum dapat diterima oleh pemerintah. Lembaga pendidikan Islam masih merupakan lembaga pendidikan yang terlepas dari sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah. Lembaga pendidikan Islam ini tetap berpegang teguh pada tradisinya sendiri.

Pengajaran yang dilakukan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua: **Pertama**, pengajaran al-Qur'an yang merupakan pendidikan Islam paling sederhana atau pengajaran dasar. Para santri diajarkan tentang cara membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Pada tahap ini para santri diajarkan kaidah-kaidah *tajwid* (tata cara membaca al-Qur'an yang benar). Para santri belum dibekali tata cara menafsirkan al-Qur'an maupun ilmu lain berkenaan dengan al-Qur'an. **Kedua**, pengajian kitab sebagai pendidikan lanjutan. Pengajaran kitab ini merupakan pendidikan lanjutan bagi para santri yang telah mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu *tajwid*. Pada tahap ini para santri diajarkan ilmu-ilmu keislaman lain, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan asal-usul pesantren, Soegarda Poerbakawatja mensinyalir bahwa pesantren merupakan sistem pendidikan yang adopsi dari sistem pendidikan Hindu di India.¹ Hal ini misalnya dapat dilihat dari penyerahan tanah oleh pemerintah bagi kepentingan agama yang terdapat dalam tradisi Hindu India.² Selain itu, sistem pesantren

¹ Karel A Steenbrink tidak menyinggung tujuan dibentuknya pesantren. Menurut Hasbullah, pembentukan pondok pesantren mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembentukan pesantren adalah untuk membimbing para santri agar menjadi manusia yang berkepribadian Islam serta membekalinya dengan ilmu sehingga ia dapat menyampaikannya kepada masyarakat. Adapun tujuan khususnya adalah mempersiapkan santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama serta dapat mengamalkannya dalam masyarakat. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan*, Cet. III, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999, h. 109.

² Pada pendidikan pra Islam Indonesia, lembaga pendidikan pesantren ini berfungsi mencetak elit agama Hindu dan Budha. Setelah Islam masuk dan berkembang, pesantren beralih fungsi sebagai tempat berlangsungnya pembelajaran ilmu-ilmu keislaman, baik berupa doktrin dasar Islam maupun praktik kehidupan sehari-hari. Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran, 2005, h. 145.

juga tidak ditemui dalam sistem pendidikan di Mekkah, antara lain: sistem pendidikan yang bersifat agama, guru tidak mendapat gaji, serta penghormatan yang besar terhadap para guru dan keluarganya.³

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Mahmud Junus. Ia menyatakan bahwa sistem pesantren telah ditemukan di Bagdad ketika menjadi ibu kota wilayah Islam. Penyerahan tanah untuk kepentingan umat, utamanya pendidikan telah dikenal dalam tradisi Islam. Tradisi ini dipadankan dengan sistem wakaf dalam terminologi Islam. Namun demikian terlalu sederhana jika kita menganggap bahwa sistem pesantren berasal dari kedua wilayah tersebut tanpa melakukan kajian lebih lanjut.⁴

Adapun sistem pendidikan yang dikelola oleh kolonial Belanda pada dasawarsa akhir abad XIX merupakan pendidikan yang liberal. Pendidikan yang dilakukan hanya diperuntukkan untuk pihak kolonial.⁵ Kalaupun terdapat orang Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan model kolonial ini, jumlahnya hanya sedikit sekali. Pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat umum secara luas baru dimulai sejak permulaan abad XX melalui pendidikan yang dimotori oleh orang-orang pribumi.⁶

Faktor pendorong perubahan Islam di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa hal:⁷ 1) Adanya keinginan dari beberapa pihak untuk kembali pada al-Qur'an

³ Sangat sulit untuk mengidentifikasi penggunaan istilah pesantren dalam sistem pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya pesantren pertama di Jawa. Namun cikal bakal pesantren ini sudah terlihat dalam perjuangan wali songo dalam menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan masjid dan asrama untuk para santri. Misalnya, Sunan Ampel mendirikan lembaga pendidikan di Ampel Denta, Sunan Giri mendirikan lembaga pendidikan Islam di Giri. Lembaga pendidikan inilah yang disinyalir sebagai cikal bakal model pendidikan pesantren seperti yang berkembang sekarang ini. Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 145-146

⁴ Nampaknya Steenbrink tidak membahas mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Dengan mengetahui kapan masuknya Islam ke Nusantara ini dapat diketahui apakah pendidikan pesantren memang berasal dari tradisi Islam ataukah merupakan tradisi lokal. Dinyatakan bahwa dalam sejarah pendidikan Jawa telah dikenal lembaga pendidikan yang bernama "Pawiyatan". Lembaga pendidikan ini telah ada di masyarakat Jawa sebelum kedatangan Islam. Dalam pawiyatan ini tinggal Ki ajar sebagai pengajar dan "cantrik" sebagai santri/orang yang diajar. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang telah dikenal. Satu teori menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari India. Teori ini didukung oleh Pijnappel dari Leiden University, Moquette, Snouck Hourgronje. Terdapat pula teori yang menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Arab. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana, di antaranya Crawford, Niemann dan Naquib Al-Attas. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet II, (akarta: Putra Grafika, 2009, h. 21. Selain itu juga muncul teori bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Kerajaan Sriwijaya pada abad 7 / 8 M. Adapula yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-11 M, bahkan abad ke-16. Namun kesemuanya itu bisa diterima karena menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Lihat Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*. ..., h. 140-141.

⁵ Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan model sekolah sebenarnya telah dilaksanakan oleh Belanda karena semangat keagamaan mereka yang Protestan, Calvinisme. Pendidikan yang mereka laksanakan lebih bertujuan untuk menenyapkan agama Katolik yang dibawa oleh Portugis sebelumnya. Oleh karena itu sekolah yang mereka didirikan mayoritas berada di daerah yang pernah dijajah oleh Portugis. Hal ini berlaku bagi sekolah-sekolah di luar Jawa, utamanya Maluku dan sekitarnya. Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, ..., h. 29

⁶ Dalam pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda, terdapat beberapa sikap diskriminasi terhadap pendidikan Islam, antara lain: diskriminasi sosial, diskriminasi ras, diskriminasi anggaran, serta diskriminasi dalam hal kepemelukan agama. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Abuddin Nata (Editor), *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia*, Bandung: Percetakan Angkasa, 1996, h. 16.

⁷ Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, Jakarta; Pustaka LP3ES, 1994, h. 42. Pendapat lain menyatakan bahwa pembaharuan pendidikan Islam dilatar

dan al-Sunnah sebagai titik tolak melakukan penilaian kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada; 2) Adanya perlawanan nasional -utamanya dari umat Islam- terhadap penguasa kolonial Belanda; 3) Adanya usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasi dalam berbagai bidang, utamanya dalam bidang sosial ekonomi. Upaya ini dilakukan baik karena didorong kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok; 4) Upaya pembaharuan pendidikan Islam yang didorong oleh rasa tidakpuas atas metode pendidikan tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan hadis yang telah dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam.⁸

Gerakan atau upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan misalnya dapat dilihat dalam pembaharuan Islam Minangkabau (1906-1930). Terdapat dua gerakan pembaharuan yang terjadi di Minangkabau pada awal abad XX, yaitu gerakan pembaharuan yang dimotori oleh Abdullah Ahmad dan gerakan pembaharuan yang dimotori oleh murid-murid Hamka. Gerakan pembaharuan yang dimotori oleh Abdullah Ahmad. Abdullah Ahmad adalah seorang pembaharu (modernisator) yang telah mendirikan Madrasah Adabiyah. Sekolah ini merupakan adaptasi dari sistem pendidikan surau dengan sistem pendidikan Barat dengan penyesuaian yang dilakukan secara total.⁹ Sekolah ini memberikan perhatian yang sangat kecil terhadap pendidikan agama. Karena penyesuaian yang total terhadap sistem pendidikan Barat inilah, dalam beberapa tahun saja banyak masyarakat muslim yang menolak dan meninggalkannya. Karena hal ini pula, beberapa kalangan masyarakat menyebut Abdullah Ahmad sebagai seorang Hollandisator.

Sementara itu, gerakan pembaharuan yang dimotori oleh murid-murid Hamka. Pembaharuan pendidikan di Sumatra sudah berjalan cukup lama, namun hasil pembaharuan pendidikan yang pertama dan dapat bertahan lama adalah bentuk Madrasah Diniyah dan Sumatra Thawalib. Pembaharuan ini bukan berasal dari kota besar, melainkan berasal dari daerah yang lebih kecil. Madrasah diniyah pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan dasar yang berupa pengajian al Qur'an. Adapun Sumatra Thawalib merupakan pendidikan agama lanjutan, yaitu perkembangan dari pengajian kitab.

Selain pembaharuan di Minangkabau, juga terdapat pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan di Jogjakarta pada tanggal 18 November 1912. Gerakan pembaharuan Muhammadiyah ini lebih terfokus pada masyarakat perkotaan. Sebelumnya, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1911 Ahmad Dahlan dapat mendirikan sekolah Islam swasta pertama yang memenuhi

belakangi oleh dua faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal umat Islam adalah doktrin Islam yang menganjurkan umatnya untuk selalu berijtihad. Sedangkan faktor eksternal adalah hubungan yang intensif dengan dunia Barat, baik dalam budaya, politik, ekonomi maupun sosial. Lihat Armai Arief (Editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2005, h. 219.

⁸ Pembaharuan pendidikan Islam banyak terjadi di daerah Jawa dan Sumatra karena hubungan kedua wilayah tersebut dengan para pedagang dan musafir muslim. Hal ini dapat dilihat dari jalur perdagangan antara kedua daerah tersebut dengan India dan Timur Tengah. Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 83-84.

⁹ Setelah terjadi penyesuaian tersebut nama-nama madrasah berubah menjadi HIS (Holand Inland School) Adabiyah. HIS Adabiyah inilah yang merupakan sekolah pertama yang memasukkan pelajaran umum ke dalamnya. Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 69.

persyaratan untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sekolah tersebut didirikan di wilayah keraton Jogjakarta dan mendapat dukungan penuh dari pihak keraton. Oleh karena itu gerakan Muhammadiyah ini dapat berkembang dengan pesat, utamanya di Jogjakarta.¹⁰

Masyarakat Arab di Jakarta, Surabaya dan beberapa tempat lain juga melakukan upaya pembaharuan. Keturunan Arab di Jakarta, Surabaya berhasil mendirikan Al Jam'iyah al Khairiyah (Jami'at Khair) pada tahun 1905. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang diperuntukkan bagi keturunan Arab dengan sistem pendidikan ala Barat. Namun dalam perjalanannya, organisasi ini mengalami perpecahan karena perbedaan mengenai hak istimewa bagi keturunan Nabi. Perempuan *sayyid* tidak boleh menikah dengan orang yang bukan keturunan *sayyid*. Golongan yang membela hal tersebut kemudian membela *taqlid*, sedangkan yang menolaknya juga menolak *taqlid*. Perbedaan ini berujung pada perpecahan yang akhirnya pada tahun 1913 muncul organisasi Jamiah al Islam wal Irsyad al Arabia (al Irsyad) yang banyak menyuarakan pembaharuan Islam. Ide reformasi ini masuk ke lingkungan masyarakat arab Indonesia terutama sejak kedatangan Ahmad Surkati dari Sudan yang dikontrak untuk mengajar di sekolah-sekolah Arab. Selain itu juga didukung oleh masuknya ide pembaharuan melalui majalah Al-Mannar (Rasyid Ridha) dan majalah Al Iman yang diterbitkan di Singapura.

Pembaharuan pendidikan juga dilakukan Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI). Tahun 1913, A. Surkati bergabung dengan Al-Irsyad dan kemudian mendirikan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI).¹¹ Beberapa bulan kemudian para guru yang lebih tradisional mendirikan Persatuan Ulama Sumatra. Namun demikian terdapat beberapa orang yang menjadi anggota kedua kelompok tersebut, sebut saja Ibrahim Musa Parabek. Beberapa tahun kemudian ulama tradisional yang tergabung dalam Persatuan Ulama Sumatra menjadi lebih aktif setelah bergabung dengan Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI) yang didirikan pada 5 Mei 1928 di rumah Sulaiman Ar-Rasuli (pimpinan tarikat Naqshabandiyah). Kelompok yang diundang dalam deklarasi PERTI adalah ulama yang tidak setuju dengan pendidikan model madrasah diniyah, Sumatra Thawalib dan PGAI atau kelompok kaum muda.

Pada tahun 1918, kelompok kaum tua yang dimotori Syaikh Abbas melakukan perbaikan atas pendidikan yang dilakukan dengan mendirikan *Arabiyah School* dan tahun 1924 mendirikan *Islam School*. Pada perkembangan selanjutnya diupayakan untuk dilaksanakan pendidikan klasikal di setiap surau. PERTI baru mendapat pengakuan dari pemerintah pada tahun 1930 dan semakin berkembang sehingga diperkirakan bahwa tahun 1945 terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45000 orang murid.¹² Sampai tahun 1947, sekolah-sekolah ini banyak memasukkan materi pelajaran umum. Selain bidang pendidikan, organisasi ini juga membangun sejumlah masjid, rumah yatim piatu dan mendirikan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI). PERTI memberikan

¹⁰ Sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan adalah Madrasah Muhammadiyah (Kweekschool Muhammadiyah) yang kemudian berubah menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia, ...*, h. 69.

¹¹ Pendidikan yang dilaksanakan oleh Al-Irsyad berbentuk madrasah awaliyah (3 tahun), madrasah Ibtidaiyah (4 tahun), madrasah Takhziziah (2 tahun), madrasah Muallimin (4 tahun), dan takhassus (2 tahun). Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan, ...*, h. 113.

¹² Pada perkembangannya, pada tahun 1930 al-Irsyad mampu memberikan beasiswa ke luar negeri, utamanya ke Mesir. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan, ...*, h. 115.

sumbangan yang cukup besar bagi masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan dan kota-kota kecil di Minangkabau.

Nahdlatul Ulama juga melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Tahun 1914 KH Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Wathan bersama H. Mas Mansur untuk melaksanakan pendidikan yang lebih modern bagi masyarakat. Pada tahun 1922 sudah berdiri beberapa sekolah, namun Mas Mansur bergabung dengan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama (yang awalnya adalah Komite Merembuk Hijaz) didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai protes dari gerakan reformis dan memenuhi kebutuhan untuk membela madzhab Syafi'i dan menyaingi Muhammadiyah dan al-Irsyad.¹³

NU semakin populer saat KH. Hasyim Asy'ari memimpin organisasi tersebut pada 1927. Namun demikian NU masih belum menjadi organisasi yang diatur secara tegas. Dalam bidang pendidikan, pembaharuan baru dilakukan oleh KH. Moh Ilyas dan KH. Abdul Wahid dengan memasukkan pelajaran membaca, menulis latin, ilmu bumi, sejarah, bahasa melayu dan memasukkan surat kabar ke pesantren.¹⁴

Gerakan yang dilakukan oleh Persyarikatan Ulama dan KH Abdul Halim dari Majalengka juga menggambarkan hal yang sama. KH. Abdul Halim (lahir tahun 1887) yang berasal dari keluarga ulama serta mempunyai hubungan dengan kelompok priyayi pernah belajar di Makkah. Pada tahun 1915 ia mendirikan perkumpulan *Hayatul Qulub*, sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan koperasi simpan pinjam. Dalam menyebarkan ide-idenya, ia mendirikan Perserikatan Ulama, yang kemudian juga mendirikan rumah yatim piatu, percetakan dan perusahaan tenun. Pada tahun 1932 Abdul Halim mendirikan "Santi Asrama", sebuah sekolah berasrama yang tidak hanya mengajarkan agama dan ilmu umum, tapi juga mengajarkan pertanian, pertukangan dan seni mengukir kayu.

Pada tahun 1945 berdiri perkumpulan yang serupa di Jawa Barat, dengan nama Persatuan Umat Islam (PUI) yang berpusat di Majalengka dan Sukabumi. Namun Persyarikatan Ulama yang memadukan pendidikan umum, agama dan ketrampilan ini tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan beberapa sebab: *pertama*, penilaian yang agak rendah terhadap pendidikan keterampilan. *Kedua*, adanya keinginan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. *Ketiga*, banyaknya ulama PUI yang terjun dalam politik sehingga sekolah-sekolah mereka kurang mendapat perhatian.

Pembaharuan Pendidikan di Sumatra Utara juga dilakukan oleh al-Jamiyah al-Washiliyah. Tanggal 25 November 1927 para pedagang kecil dan menengah di Medan mendirikan cabang Muhammadiyah. Kelompok ini dipimpin oleh Mohammad Said yang sebelumnya menjadi ketua Sarekat Islam. Pada perkembangannya, kelompok ini mendirikan al-Jam'iyah al-Washiliyah guna mengembangkan Islam dalam arti yang lebih luas, namun berpegang pada madzhab Syafi'i. Pada mulanya, pada tanggal 15 Mei 1918 didirikan sekolah agama "Maktab Islamiyah Tapanuli" yang merupakan kelas agama

¹³ Motivasi utama berdirinya NU adalah untuk mengorganisir potensi dan peran ulama pesantren yang sudah ada sehingga dapat dikembangkan secara luas. Hal ini dilakukan agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan*, ..., h. 107.

¹⁴ Perlu digaris bawahi bahwa pendidikan yang dilakukan NU adalah untuk memajukan masyarakat yang terbelakang karena kurangnya pendidikan serta membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan*, ..., h. 109.

tambahan pada siang hari bagi para siswa gubernemen. Sekolah ini kemudian mendirikan *debating club* yang menjadi cikal bakal al-Jam'iyah al-Washiliyah. Jam'iyah ini dipimpin oleh tiga orang yang mempunyai tugasnya masing-masing: Abdurrahman Syihab sebagai penghimpun jamaah, Udin Syamsudin yang ahli dalam bidang administrasi dan Arsyad Lubis yang merupakan seorang ahli agama.

Apabila dibandingkan dengan PERTI maupun NU, jam'iyah ini lebih teratur dan sentralistis.¹⁵ Hal ini terbukti dengan diadakannya inspeksi ke semua madrasah di bawah naungannya setiap enam bulan sekali. Selain itu juga dilakukan perpindahan guru dari satu madrasah ke madrasah yang lain di bawah naungan al-Jam'iyah al-Washiliyah. Selain itu juga telah ada sistem penggajian guru, bahkan pemberian ijazah langsung dari kantor pusat al Jam'iyah al Washiliyah di Medan.

Selain bidang pendidikan, jamiyah ini juga mengembangkan bidang lain. Terbukti dengan terbentuknya majlis fatwa, madrasah untuk yatim piatu, serta diterbitkannya majalah. Namun demikian jamiyah ini tetap memprioritaskan pendidikan dalam semua programnya.¹⁶

Sejak didirikan pada 3 Januari 1946, Departemen Agama berusaha menghapuskan perbedaan sistem sekolah dan madrasah. Hal ini tercermin dalam nota *Islamic Education in Indonesia* tertanggal 1 September 1956. Nota *Islamic Education* tersebut berisi: *pertama*, memberikan pengajaran agama di sekolah umum. *Kedua*, memberikan pengetahuan umum di madrasah. *Ketiga*, pengadaan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN).

Terkait pendidikan agama di sekolah, Departemen Agama telah mengeluarkan kebijakan yang konsekuen dengan sistem sekolah diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan agama dapat meluas dan berkembang. Walaupun dalam UU pendidikan no 4 tahun 1954 telah diatur pendidikan agama, namun hal tersebut masih memojokkan pendidikan agama di sekolah. Para siswa harus mendapatkan persetujuan dari orang tua untuk dapat mengikuti pelajaran agama di sekolah.

Sementara terkait pendidikan umum di madrasah, Departemen Agama menganjurkan agar semua pesantren mengadakan pengajaran umum bagi para santri. Selain itu juga diupayakan untuk memberikan bantuan kepada madrasah yang memberi perhatian pada pelajaran umum, meskipun bantuan tersebut hanya dikhususkan untuk mata pelajaran umum. Seiring berjalannya waktu, pendidikan madrasah mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang Undang 1950 pasal 10 yang menyatakan bahwa dengan belajar di madrasah yang diakui Departemen Agama berarti telah memenuhi kewajiban belajar.

¹⁵ Al-Washiliyah menyelenggarakan pendidikannya yang berupa: Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun), Madrasah Tsanawiyah (3 tahun), Madrasah Qismul Ali (3 tahun), Madrasah Muallimin (3 tahun), PGA, SD al Washiliyah (6 tahun), SMP al Washiliyah (3 tahun), dan SMA al Washiliyah (3 tahun). Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan, ...*, h. 125.

¹⁶ Dengan bergulirnya modernisasi di lembaga-lembaga pendidikan, utamanya pesantren, banyak lembaga pendidikan ini yang akhirnya kehilangan peran utamanya. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga pendidikan pesantren mempunyai peran tradisional yang sangat dominan. Peran penting pesantren dalam masyarakat Indonesia antara lain: *pertama*, sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu keislaman (*transmission of Islamic Knowledge*). *Kedua*, sebagai pemelihara tradisi luhur Islam (*maintenance of Islamic tradition*). *Ketiga*, sebagai pusat reproduksi ulama (*reproduction of ulama*). Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia, ...*, h. 147.

Dari perkembangan yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah upaya untuk mengubah sistem pendidikan tradisional ke bentuk yang lebih modern. Dari sistem pesantren menjadi sistem madrasah, dari metode pendidikan tradisional menjadi klasikal. Perkembangan ini mengarah pada sebuah model sekolah sebagai model pendidikan umum yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini nampaknya merupakan sebuah langkah berani yang diambil oleh lembaga pendidikan Islam untuk mempertahankan identitasnya sendiri. Pendidikan model madrasah pada akhirnya hanya memberikan sedikit porsi bagi pendidikan agama.

Sosok Guru Agama

Perkembangan sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia, utamanya madrasah pada dasarnya merupakan penyesuaian antara sistem pendidikan asli Indonesia dengan sistem pendidikan Barat.¹⁷ Kebijakan konvergensi yang ada merupakan sebuah sintesa antara sistem pesantren dan sekolah.

Pada zaman kolonial, pemimpin agama dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: *pertama*, pegawai yang menjabat penghulu. Pemimpin agama ini bertugas mengurus masjid-masjid di kota besar, menjadi anggota pengadilan agama, maupun penasihat pengadilan umum. *Kedua*, para guru agama yang memimpin pesantren. Mereka biasa disebut guru, kiyai, ulama, *syaikh* dan lain sebagainya.¹⁸ Antara dua kelompok pemimpin agama ini sering terjadi perbedaan yang cukup tajam. Para guru agama umumnya menganggap para pegawai agama (penghulu) kurang memiliki pengetahuan agama. Mereka hanya mengharapkan gaji dari pemerintah belaka. Di samping itu banyak guru agama yang tidak suka untuk melamar menjadi pegawai agama. Mereka beranggapan bahwa menjadi pegawai agama tidaklah cocok bagi mereka.

Berbeda dengan pegawai agama yang memerlukan syarat-syarat formal, tidak diperlukan kriteria formal untuk menjadi seorang guru (kiyai). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kiyai. Di antara faktor-faktor tersebut antara lain: pengetahuan, kesalehan, keturunan dan jumlah murid yang dimiliki oleh seseorang.

Untuk menjadi seorang tokoh agama diperlukan perjuangan yang panjang. Tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut dari masyarakat. Ketika seorang kiyai¹⁹ (guru agama) meninggal maka kepengurusan/pengelolaan lembaga

¹⁷ Kelahiran madrasah dikarenakan ada ketidakpuasan atas pendidikan pesantren yang menitikberatkan pendidikan agama. Selain itu juga didasari atas ketidakpuasan masyarakat atas pendidikan umum (kolonial) yang tidak menghiraukan pendidikan agama. Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia, ...*, h. 66.

¹⁸ Dalam penelitiannya ini Steenbrink sama sekali tidak mengutip karya ulama terdahulu tentang kriteria seorang pengajar kemudian menyesuaikannya dengan kenyataan para guru agama di Indonesia. Misalnya al-Gazali yang menyatakan delapan etika yang harus dimiliki oleh seorang guru. Delapan hal tersebut -sebagaimana dikutip Armai Arief- adalah: kasih sayang terhadap para murid, selalu meneladani Rasulullah, selalu memberikan nasihat pada para murid, mencegah dekadensi moral para murid dengan cara yang halus, spesialisasi dalam bidang tertentu, memperhatikan tingkat kemampuan siswa, mengajarkan materi dengan mudah dan jelas, serta mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Di samping itu, nampaknya perlu juga diungkapkan keadaan atau sikap para murid/santri dalam sejarah pendidikan Islam dan jika perlu dibandingkan dengan etika yang harus dimiliki oleh seorang murid menurut para pemikir Islam klasik. Armai Arief (editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik, ...*, h. 235-245.

¹⁹ Kata "Kiyai" bisa dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda: *Pertama*, gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; *Kedua*, gelar untuk orang tua pada umumnya; *Ketiga*, gelar untuk

pendidikan yang ditinggalkan akan secara otomatis menjadi tanggung jawab putra kiyai yang meninggal tersebut. Kalaupun sang kiyai tidak mempunyai putra maka pastilah kiyai tersebut telah menyiapkan penerusnya sejak awal. Misalnya dengan mengangkat kerabat untuk mengurus lembaga pendidikan, menikahkan putrinya dengan putra kiyai sekitar, atau dengan santri yang dianggap mumpuni. Walaupun pada dasarnya agama tidak mengajarkan hal yang demikian, namun inilah kenyataan yang terjadi. Ada anggapan bahwa hasil pekerjaan kiyai yang berupa lembaga pendidikan atau semisalnya akan berpahala di hari kiamat. Sumber pahala tersebut pastinya akan diserahkan kepada orang yang dipercaya, dan siapa lagi kalau bukan kerabat sang kiyai. Hal inilah yang kemudian menyebabkan banyak pesantren yang mundur setelah ditinggalkan oleh sang pendiri. Keturunan pendiri lembaga tersebut tidak mampu mempertahankan kewibawaan dan ilmu pengetahuan yang ada pada generasi sebelumnya.

Namun demikian, terdapat beberapa keberatan terhadap prinsip keturunan ini, di antaranya: perkawinan antar keluarga dekat ini dapat menyebabkan lemah keturunan. Kontinuitas lembaga pendidikan juga tidak terjamin karena belum tentu keturunan kiyai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu penyebaran pesantren kurang merata karena berkumpulnya masyarakat di lingkungan pesantren dan keengganan para guru agama untuk membuka pesantren di lingkungan yang baru. Di samping itu terdapat keberatan akan adanya kultus pribadi apabila prinsip keturunan tetap dipertahankan.

Meskipun prinsip keturunan sering ditemukan dalam lembaga pendidikan pesantren, namun hal ini semakin memudar. Hal ini disebabkan tidak adanya dasar dalam ajaran agama. Selain itu juga disebabkan oleh perbaikan kurikulum dan sistem pendidikan yang berkembang. Dari sinilah terjadi perubahan dalam hal tenaga pengajar, dari yang semula bergelar *syaiikh*, ajengan atau yang lain mulai digeser oleh para guru agama lulusan lembaga pendidikan tinggi dengan gelar BA ataupun Drs. Dengan demikian unsur keturunan tidak lagi merupakan faktor penentu yang utama, akan tetapi unsur pengetahuan yang diperkuat dalam sistem pendidikan Islam Indonesia.

Terkait dengan faktor kesalehan, amal seseorang membuktikan keimanan yang dimilikinya. Untuk menjadi seorang kiyai diperlukan kesalehan pribadi maupun sosial. Seorang dikatakan menjadi kiyai apabila mengajar tanpa lelah, pagi hingga sore serta bersedia masuk ke desa-desa untuk mengajarkan agama tanpa imbalan selain ongkos. Ia tidak dibayar karena mengajarkan agama karena hal tersebut dianggap sebagai sebuah ibadah dan tidak sepatutnya ia dibayar untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁰

Seiring berjalannya waktu, unsur kesalehan ini semakin memudar. Hal ini dapat dilihat, utamanya pada para guru madrasah. Untuk menjadi seorang guru agama, hal yang lebih dipentingkan adalah unsur intelektual, bukan kesalehan seseorang. Unsur intelektual seseorang ini harus dapat diukur dan dibuktikan dengan ijazah yang dimiliki, seperti PGA, IAIN, dan madrasah.

orang Islam yang menjadi pemimpin agama. Suwito (Editor), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, Cet II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 272.

²⁰ Pada masa selanjutnya terdapat beberapa golongan yang menjelaskan bahwa secara keilmuan kiyai mempunyai ciri: penguasaan ilmu agama yang mendalam, pengakuan akan keilmuan yang dimiliki, penguasaan kitab kuning yang matang, taat beribadah, kemandirian dalam bersikap, tidak mau mendatangi penguasa, mempunyai geneologi ke-kiyai-an, dan mendapat ilham dari Allah. Suwito (Editor), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, ..., h. 272.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga Ia lah yang paling berhak menafsirkan sumber ajaran agama, yaitu al-Qur'an. Dalam hal penafsiran ajaran agama ini umat Islam (khususnya Indonesia) berpegang pada hadis Nabi. Setelah Nabi, kewibawaan penafsiran dipegang oleh sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga para pendiri madzhab. Kewibawaan penafsiran ini tidak diperdebatkan sampai abad XX. Namun pada perkembangannya, kewibawaan penafsiran ini dipertanyakan oleh beberapa kelompok.

Kelompok yang mempertanyakan kewibawaan penafsiran ini terdiri dari para reformis yang banyak dipengaruhi oleh para tokoh pembaharu, baik dari Timur Tengah maupun India dan Pakistan. Kelompok reformis ini banyak mengambil keputusan atas dasar hadis. Mereka juga beranggapan bahwa berpegang erat pada ulama besar dalam tradisi Islam merupakan penyimpangan dari jalan yang benar. Hal ini didasari oleh anjuran agama untuk meneliti dan berfikir sendiri. Selain itu, pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan, kewibawaan penafsiran ini menjadi terpusat pada pemerintah pusat. Kewibawaan penafsiran syariat individual seorang kiyai juga semakin memudar karena alasan teologis, ushul fiqih dan alfabetisasi dengan memperkenalkan dunia yang lebih luas dari dunia mereka sendiri. Hal ini diperparah dengan campur tangan pemerintah kolonial dalam masalah Islam yang dilakukan untuk kepentingan kolonial. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan digantikannya kewibawaan penafsiran *uṣūl* dan *furū'* dari para kiyai oleh komisi fatwa dalam organisasi regional maupun nasional.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perubahan kedudukan guru agama di kalangan umat Islam. Perubahan tersebut antara lain: **Pertama**, pandangan terhadap guru agama yang semula merupakan pusat kegiatan agama di lingkungannya mulai bergeser. Para guru agama mulai terikat dan menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar. Organisasi inilah yang kemudian menentukan materi yang diajarkan oleh seorang guru agama. Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat guru agama yang menjadi pemimpin suatu organisasi, namun ia tidak lagi menjadi penafsir agama yang mandiri.

Kedua, sosok seorang kiyai yang multifungsi menjadi terkotak-kotak oleh beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah organisasi dan pekerjaan yang digeluti. Materi yang diajarkan seorang guru agama menjadi terbatas karena disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Ia juga bekerja menjadi pegawai untuk memperoleh penghasilan/gaji. Adapun pekerjaan lain seperti berdagang, menjadi konsultan agama, khatib di masjid-masjid merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu-waktu yang terluang.

Ketiga, pertentangan yang terjadi antara penghulu dan kiyai mulai berkurang. Hal ini terjadi karena jurang pemisah antara keduanya telah memudar. Hal ini tidak lain karena Departemen Agama sendiri yang telah menghilangkan jurang pemisah antara penghulu, guru dan kiyai. Walaupun terdapat beberapa kalangan yang tidak senang terhadap Departemen Agama, namun hal ini tidak seperti pertentangan antara kyai dan penghulu pada masa lalu. Pertentangan yang ada lebih merupakan pertentangan kaci dalam bidang agama dan non-agama antara dua organisasi yang sejajar.

Perubahan Materi Pengajaran Agama

Pada awal abad XX, kurikulum dalam arti modern masih belum ada. Kurikulum yang ada lebih merupakan rencana studi yang agak global. Sedangkan sumber mengenai pendidikan hanya memberikan daftar pelajaran yang dipakai di daerah tertentu. Namun

demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya telah terjadi perubahan kurikulum dalam pelajaran agama.²¹ Pada era tahun 1964 dibentuklah madrasah diniyah melalui keputusan menteri agama. Dengan demikian madrasah menjadi sebuah institusi pendidikan yang diakui secara resmi oleh negara. Selain itu dalam pembelajaran di sekolah-sekolah umum juga telah ditetapkan mata pelajaran agama oleh menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1967.

Berkenaan dengan pengajian kitab tradisonal yang diajarkan di lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi: pelajaran bahasa Arab dan pelajaran kitab-kitab agama. Dalam sistem madrasah, anak didik dikenalkan tiga mata pelajaran, yaitu: bahasa Arab, pelajaran agama dan pelajaran umum. Pelajaran agama didominasi oleh pelajaran fiqih dan tafsir al-Qur'an meskipun ada materi tentang ilmu kalam.

Adapun pelajaran Bahasa Arab mempunyai penghargaan yang bersifat profan. Hal ini dikarenakan beberapa hal, baik berupa motif agama maupun non agama.²² Walaupun pemerintah kolonial tidak memberikan tempat pada mata pelajaran bahasa arab, namun di semua jenis sekolah umum tetap diwajibkan belajar huruf arab. Namun demikian masalah bahasa arab tetap menjadi masalah tersendiri karena kurangnya penghargaan sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat kurang merasa terdorong untuk mempelajarinya. Bahkan muncul beberapa keberatan dari sebagian masyarakat, utamanya dari Islam abangan. Mereka menganggap bahwa pengajaran bahasa arab merupakan bagian dari upaya menyamakan Islam Indonesia dengan Islam Arab.

Dalam pelaksanaannya, pengajaran bahasa Arab yang dilakukan masih terbatas pada pengajaran ibadah dan bacaan al-Qur'an semata. Dengan demikian para lulusan lembaga pendidikan seperti IAIN hanya dapat berpartisipasi dengan segmen agama semata. Sementara percakapan bahasa Arab yang aktif hanya diajarkan di beberapa lembaga pendidikan yang berasrama. Pengajaran bahasa Arab ini dapat menunjukkan intelektualisasi isi agama yang ditekankan pada pengertian *naş* agama, kritik terhadap bacaan al-Qur'an yang tidak dipahami dan yang digunakan untuk magis, mantra dan jampi-jampi semata. Pengajaran bahasa Arab ini menunjukkan proses islamisasi yang semakin maju di Indonesia. Di samping itu, dengan belajar bahasa Arab akan membuka akses yang lebih mudah untuk mengunjungi Mekkah dan Madinah sebagai sumber ajaran Islam. Dengan kata lain, terjadi santrinisasi Islam Indonesia dengan dilaksanakannya pengajaran bahasa arab.

Lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren) memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan lembaga pendidikan umum/pemerintah. Pesantren dihargai karena susunan demokratisnya. Para murid/santri akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang dari mana ia berasal. Dengan demikian ikatan persaudaraan antar para santri menjadi kuat. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan yang terjadi dalam sekolah model Barat. Sekolah model Barat menimbulkan deferensiasi, bahkan tak jarang menimbulkan jurang pemisah antar para siswa. Walaupun terdapat banyak pujian

²¹ Karel A Steenbrink sama sekali tidak menyinggung metode pendidikan yang digunakan oleh pada masa-masa awal Islam di Indonesia. Para penyebar Islam menggunakan ceramah atau nasihat langsung, teladan yang baik serta media kesenian atau permainan untuk menyebarkan ajaran Islam. Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, ...*, h. 46. Perubahan pada aspek kurikulum ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas madrasah. Perubahan kurikulum ini terjadi beberapa kali. Materi agama yang semula tetap menjadi prioritas kemudian digeser oleh materi umum dengan diberlakukannya kurikulum 1994. Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia, ...*, h. 71.

²² Karel A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, ...*, h. 176.

terhadap pesantren dan madrasah, namun dalam kenyataan sosial keduanya makin lama makin kurang dihargai. Hal ini disebabkan pengakuan sosial yang diberikan masyarakat kepada para santri. Masyarakat akan memberikan penghargaan jika santri mendapatkan ijazah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian maka masalah utama yang dihadapi oleh pesantren dan madrasah adalah kurangnya pendidikan umum. Materi pelajaran umum yang diberikan di lembaga pendidikan tersebut tidak sebanding dengan materi umum yang diberikan di sekolah. Selain itu, pendidikan model pesantren dan madrasah tidak mempunyai efek sipil dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perubahan dalam lingkungan pesantren. Pesantren tidak lagi merupakan lembaga pendidikan tradisional semata. Telah muncul beberapa pesantren terbuka yang mana para santri mengikuti pelajaran di sekolah umum yang berada di luar lingkungan pesantren. Pesantren jenis ini sudah berdiri di beberapa daerah, mulai pedesaan sampai perkotaan. Santri yang belajar di sana juga berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selain itu juga terdapat kombinasi antara pesantren (tradisional) dan madrasah modern dengan berbagai bentuknya.

Penghargaan Agama Terhadap Pendidikan Umum

Secara teoritis, Islam menolak adanya pemisahan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lain. Hal ini terutama terlihat dalam gerakan reformis yang mencita-citakan kembali pada al-Qur'an dan hadis. Upaya mengintegrasikan agama dan ilmu umum ini sudah diupayakan dengan mendirikan lembaga pendidikan dimana ilmu agama dan ilmu umum diajarkan secara bersama. Selain itu juga dilakukan penambahan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Keduanya dilakukan untuk menghasilkan ulama yang intelek serta untuk mengisi kekosongan para intelektual akan agama.

Ilmu umum sangat dihargai di dalam ajaran agama Islam. Begitu pula materi pelajaran umum banyak diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya: ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan kajian-kajian tentang berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu juga terdapat penghargaan sosial terhadap para pemuka agama yang mempunyai pendidikan agama dan pendidikan umum. Para pemuka agama akan dianggap terbelakang apabila tidak mempunyai pengetahuan umum. Para pemuka agama yang ingin meraih karir dalam masyarakat, di samping memiliki kemampuan agama yang mumpuni juga memerlukan pengetahuan umum yang dibuktikan dengan ijazah yang mencantumkan pendidikan umum. Dengan demikian nampaklah penghargaan terhadap pendidikan umum bagi masyarakat.

Walaupun banyak pujian yang dilontarkan terhadap pendidikan umum yang dilaksanakan di pesantren, namun hal ini tidak begitu saja dapat diterima oleh semua kalangan. Terdapat beberapa golongan yang tidak setuju dan menolaknya. Penolakan yang ada biasanya tidak secara langsung ditujukan pada pendidikan umum. Penolakan tersebut biasanya secara tegas dilakukan terhadap hal-hal yang baru, seperti bangku, papan tulis dan lain sebagainya. Sejumlah pesantren tidak dapat mengembangkan pendidikan umum dikarenakan ada anggapan bahwa pendidikan umum yang dilakukan memerlukan biaya yang lebih mahal jika dibanding dengan pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan umum di pesantren sudah tidak dipercaya lagi, bahkan dikatakan

gagal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pesantren yang kembali melaksanakan pendidikan agama semata.

Dalam penutup bukunya, Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa sintesa antara pesantren dan pendidikan Barat yang berupa madrasah lebih merupakan model peralihan. Madrasah belum menjadi penghubung antara keduanya. Hal ini dikarenakan pendidikan umum yang diberikan belum dapat memenuhi harapan yang diminta. Madrasah tidak boleh dianggap sebagai "produk final" tapi hanya merupakan sebuah bentuk yang bersifat sementara.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, madrasah merupakan sintesis dari sistem pendidikan agama dan sistem pendidikan umum. Sistem pendidikan di Indonesia telah mengadopsi pendidikan agama yang pada mulanya hanya dilakukan di pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang awalnya hanya mengajarkan ilmu agama juga telah membuka diri dengan melaksanakan pendidikan umum bagi para santri. Karel A Steenbrink telah berhasil menggambarkan sejarah pendidikan Islam sejak zaman kolonial sampai pada tahun 70-an dengan epik. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam juga yang bermunculan juga tergambar dengan baik.

Beberapa hal yang mungkin terlupakan oleh Steenbrink telah ditambahkan dalam catatan kaki. Catatan tersebut kiranya bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber lain. Hal lain yang perlu digaris bawahi, penelitian Steenbrink ini hanya dilakukan di Jawa dan Sumatra, sehingga tidak tergambar perkembangan pendidikan di luar wilayah tersebut. Sebagai penutup, nampaknya kita tetap perlu merujuk pada buku-buku lain apabila hendak mengetahui lebih dalam tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Misalnya untuk mengetahui masing-masing lembaga pendidikan yang menjadi objek penelitian Steenbrink tersebut perlu merujuk pada buku "Sejarah Pendidikan Islam" karya Hasbullah atau yang lain. Untuk mengetahui sejarah sosial perlu merujuk buku "Sejarah Sosial Islam" ataupun yang lain dalam tema yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Armai (editor). 2005. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Asrohah, Hanun. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Daulay, Haidar Putra. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Putra Grafika.
- Hasbullah. 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan*, Cet III. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.

- Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Nata, Abuddin (Editor). 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Indonesia*. Bandung: Percetakan Angkasa.
- Rahim, Husni. 2005. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan pemikiran.
- Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suwito (Editor). 2008. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Cet II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.